

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Nama Kegiatan : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 324.080.000,-
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2021
7. Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Nama : Eva Susanti, SIP
 - b. Jabatan : Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - c. Nama : Anwar, S.Sos
 - d. Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Bendahara Pengeluaran
 - a. Nama : Yusri Japriska, SE
 - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
12. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 324.080.000,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2021
 - b. Keluaran : Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - c. Hasil : Tersedianya operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun keluar daerah
- 13 Rincian Belanja Sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021		
Urusan Pemerintahan	:	5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	:	5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	5.03.01.02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	:	Januari sampai Desember 2021
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber Dana	:	APBD

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum PD			100%	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			324.080.000	
Keluaran	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12 bulan	
Hasil	Tersedianya operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun keluar daerah			12 bulan	
Rincian Belanja Sub Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5	6= (3*5)
5.1	BELANJA OPERASI				324.080.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa				324.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang				28.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				28.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat				28.500.000
	[#] Makan dan Minum Rapat				28.500.000
	[-] Makan Rapat (20 org x 12 bulan x 5 kali)				
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi: Makan dan minum rapat/kegiatan dan tamu (sudah termasuk pajak), porsi standar (nasi bungkus)	1000 orang/kali	Porsi/orang	20.000	20.000.000
	[-] Snack Rapat (20 org x 12 bln x 4 kl)				
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi: Makan dan minum rapat/kegiatan dan tamu(sudah termasuk pajak),snack (kue-kue dan minum)	1000 orang/kali	Porsi/orang	8.500	8.500.000
5.1.02.04	Belanja perjalanan Dinas				295.580.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				295.580.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				246.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi				43.900.000
	[-] Eselon II/b, Staf dan Pihak Lain (7 org x 4 kl x 10 bln)				
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Rata-rata selain Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok, Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai, Pejabat eselon II/b sampai dg staf dan pihak lain, luar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat.	200 orang/hari	Orang/perhari	200.000	40.000.000
	[-] Uang Refresentasi				
	SATUAN BIAYA REFRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Uang representasi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD.	52 orang/hari	OH	75.000	3.900.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi				
	[-] Eselon II, III, dan IV (7 orang x 3 hr x 6 kali)				

	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Luar daerah luar provinsi uang harian luar kota, Kabupaten Pesisir Selatan – DKI Jakarta	126 orang/hari	OH	530.000	66.780.000
	[-] Penginapan Eselon II : 1 org x 2 hr x 8 KI				
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Eselon II/b & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16 orang/hari	OH	600.000	9.600.000
	[-] Penginapan Eselon III: 4 org x 2 hr x 4 KI				
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Eselon III	28 orang/hari	OH	500.000	14.000.000
	[-] Penginapan Eselon IV (2 org x 2 hr x 4 KI)				
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Eselon IV	8 Orang/hari	OH	400.000	3.200.000
	[-] Tiket pesawat PP (Padang Jakarta): 6 org x 7 KI				
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Tiket Pesawat untuk luar daerah luar daerah propinsi, tujuan Propinsi, Padang-Jakarta	42 kali	PP	2.500.000	105.000.000
	[-] Uang Representasi Eselon II				
	SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Uang representasi untuk perjalanan dinas luar propinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD.	24 Kali	OH	150.000	3.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota				49.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah				49.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 6 org x 2 Hr x 2 KI x 10 bulan)				
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan sebaliknya, Tujuan Sutea, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	180 org/hari	OH	125.000	22.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 6 org x 3 Hr x 10 bln.				
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Perjalanan Dinas dalam kabupaten dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan sebaliknya, tujuan Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Rahul Tapan, Lunang dan Silaut.	80 org/Hari	OH	150.000	12.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Gol .IV, III, dan II : 5 Org x 2 Hr x 2 KI x 10 bln				
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Perjalanan dinas dalam kabupaten dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan sebaliknya, tujuan Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas.	150 org/hari	OH	100.000	15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					324.080.000

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dimana

dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik serta peningkatan kinerja ASN, maka perlunya pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dalam hal pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan setiap bulannya.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/40/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021;
- e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 800.05/09/BKPSDM-2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Bendahara Pengeluaran adalah Staf Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Menandatangani Buku Kas Umum setiap bulan;

10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
12. Mengesahkan SPJ;
13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
14. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;
21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian
22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sbb:

1. Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;

7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
10. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
11. Menandatangani SPPD;
12. Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;
13. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran

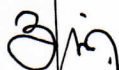
1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;
2. Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;

3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD;
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank;
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2021

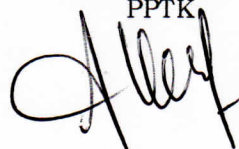
Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



EVA SUSANTI, SIP

NIP. 19721116 200501 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/
PPTK



ANWAR, S.Sos

NIP. 19721221 200701 1 001

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran/Kepala Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021

